

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Analysis of The Determinants The Level of Poverty in Indonesia

Marisa

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
marisarisa070@gmail.com

Abstract

This research aimed to analyze the effect of economic growth, government expenditure, inflation, and unemployment on the level of poverty in Indonesia. This study uses time-series data in the form of annual data from the 1997-2017 period.

This study's analysis technique uses the cointegration approach and Error Correction Model (ECM), and multiple linear regression models. The estimation results show that the variable of economic growth is statistically significant and negatively affects the level of poverty in Indonesia. Simultaneously, the variable of government expenditure, inflation, and unemployment are not statistically significant in influencing Indonesia's level of poverty.

This study implies that economic growth is a macroeconomic variable that plays a significant role in reducing Indonesia's level of poverty.

Keywords: *Economic Growth; Government Expenditure; Inflation; Unemployment; Poverty*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series* berupa data tahunan dari periode 1997-2017.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kointegrasi dan *Error Correction Model* (ECM) serta model regresi linear berganda. Hasil estimasi menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah, inflasi dan pengangguran secara statistik tidak signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makroekonomi yang berperan utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Pengeluaran Pemerintah; Inflasi; Pengangguran; Kemiskinan

Pendahuluan

Dalam suatu negara diperlukan pembangunan yang merata, maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembangunan tersebut. Pembangunan merupakan rencana perubahan dalam memperbaiki keadaan hidup golongan masyarakat tertentu diberbagai aspek. Indikator pembangunan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Agar pembangunan tercipta, maka perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di dalam suatu negara ataupun suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering di jumpai di manapun baik di negara maju atau negara berkembang, termasuk di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan beberapa negara di sekitarnya. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat atau beberapa orang dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup sehari-hari karena disebabkan keadaan masyarakat yang mengalami kekurangan. Indikator kemiskinan dilihat dari kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah yang merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Leasiwal, 2013). Oleh karena itu, semakin tingkat kesejahteraan penduduk tinggi maka semakin pula tingkat kemiskinan rendah.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2008-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66
2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47
2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96
2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13
2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70
2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12

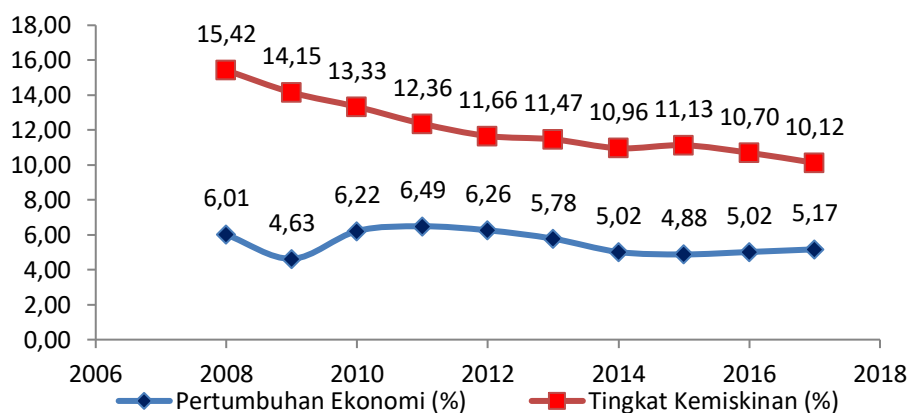
Sumber: BPS, 2018, Diolah Kembali

Tabel 1 menampilkan jumlah populasi orang miskin di Indonesia tahun 2008-2017 secara berkala turun naik selama satu dasawarsa. Angka penduduk miskin terbesar di Indonesia terjadi pada 2008 yakni sebanyak 34,96 juta jiwa (12,77 juta jiwa di perkotaan dan 22,19 juta jiwa di perdesaan). Sedangkan, angka penduduk miskin terkecil di Indonesia terjadi pada tahun 2014 sekitar 27,73 juta jiwa (10,36 juta jiwa di perkotaan dan 17,37 juta jiwa di perdesaan). Sementara itu, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami *trend* yang menurun dari 2008-2017 kecuali pada tahun 2015. Persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia terjadi di tahun 2008 sebanyak 15,42 persen (sekitar 11,65 persen di perkotaan dan sekitar 18,93 persen di perdesaan). Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin terkecil di Indonesia terjadi pada tahun 2017 sebesar 10,12 persen (sekitar 7,26 persen di perkotaan dan sekitar 13,47 persen di perdesaan).

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia terlebih dahulu sebaiknya mencari tahu faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia sehingga kedepannya diharapkan pemerintah baik dari pusat maupun daerah dapat membuat berbagai kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang efektif dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan pada dasarnya sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang fundamental yang dilakukan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat walaupun permasalahan kemiskinan ini masih sukar untuk diatasi.

Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi menjadi suatu hambatan bagi pemerintah dalam memperbaiki problematik kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah suatu hal wajib yang harus pemerintah lakukan dengan diadakannya kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Samuelson & William, 2005). Masalah lain yang muncul ialah inflasi. Inflasi jika dibiarkan secara terus menerus akan memperparah kondisi perekonomian. Akibatnya kesejahteraan segolongan besar masyarakat menurun, menyebabkan mereka menganggur sehingga mereka berkesempatan menjadi semakin miskin.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008-2017



Sumber: BPS, 2018, Diolah Kembali

Gambar 1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi selama satu dekade terakhir, pada tahun 2008 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01 persen, kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 4,63 persen yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,38 persen, ini terjadi karena disebabkan krisis keuangan global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan menyebabkan berbagai kegiatan perekonomian nasional khususnya di sektor properti mengalami stagnasi. Lalu, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,59 persen dan diikuti juga peningkatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 sebesar 6,49 persen berarti naik sebesar 0,27 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2011 terjadi karena tingginya konsumsi masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya investasi dan ekspor nasional.

Kemudian, pada 2012 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,28 persen yang berarti terjadi penurunan sekitar 0,21 persen lalu disusul pada tahun 2013 yang mengalami penurunan sebesar 5,78 persen berarti turun sekitar 0,50 persen. Selain itu, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi juga menurun sebanyak 5,02 persen dan diikuti di 2015 sebesar 4,88 persen artinya terjadi penurunan sebesar 0,90 persen selama dua tahun terakhir. Penyebabnya karena melemahnya harga komoditas, turunnya belanja konsumen, dan menurunnya kepercayaan investor Eropa ke Indonesia, serta diikuti dengan perlambatan perekonomian China, yang mana merupakan mitra kunci perdagangan Indonesia. Namun, pada tahun 2016 perekonomian Indonesia tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen dari tahun sebelumnya yang artinya terjadi peningkatan sebesar 0,14 persen yang disusul pada tahun

2017 naik sebesar 5,27 persen yang berarti mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen ini dikarenakan terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga yang didukung dengan kinerja positif pada sektor transportasi dan komunikasi, serta adanya kontribusi di sektor investasi dan ekspor untuk perekonomian nasional.

Sedangkan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami *trend* menurun selama sepuluh tahun terakhir. Ketika 2008 tercatat sebesar 15,42 persen, lalu tahun 2009 menyusut lagi jadi 14,15 persen yang artinya terjadi penurunan sebesar 1,27 persen. Kemudian 2010 turun sekitar 13,33 persen, disusul pada 2011 turun lagi sebesar 12,36 persen, lalu terjadi penurunan lagi pada tahun 2012 sebesar 11,66 persen begitupula pada tahun 2013 turun kembali sebesar 11,47 persen, dan turun lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sebesar 10,96 persen.

Artinya, selama tahun 2010 sampai 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,37 persen hal ini disebabkan karena rendah dan terkendalinya tingkat inflasi, menurunnya rata-rata harga kebutuhan pokok, rendahnya stabilitas harga barang konsumsi, TPT menurun, dan naiknya nilai rerata pendapatan buruh petani, juga karena adanya peningkatan investasi serta adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan dana bantuan untuk masyarakat miskin.

Namun, di 2015 tingkat kemiskinan di Indonesia bertambah menjadi 11,13 persen yang artinya naik sebesar 0,17 persen ini diakibatkan adanya perlambatan ekonomi di dunia. Tetapi, ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2016 tingkat kemiskinan menurun sebesar 10,70 persen yang artinya turun sebesar 0,43 persen. Kemudian, disusul juga pada tahun 2017 yang turun sebesar 10,12 persen yang artinya terjadi penurunan sebesar 0,58 persen. Penurunan tingkat kemiskinan pada dua tahun terakhir ini disebabkan karena empat faktor yaitu inflasi yang rendah dan terkendali sehingga menyebabkan jumlah orang miskin menurun serta pertumbuhan ekonomi yang terjaga sehingga ketimpangan ekonomi menurun, turunnya rerata harga sembako, turunnya angka orang yang tidak bekerja, dan naiknya bayaran buruh tani per hari.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi yang naik turun dan tingkat kemiskinan yang menurun masih belum sejalan. Ini dikarenakan adanya ketidakmerataan pembangunan di sejumlah daerah yang masih tinggi. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena laju inflasi relatif rendah, adanya penurunan harga-harga kebutuhan pokok, lalu terjadinya penurunan harga ritel sembako seperti telur dan gula pasir, kenaikan upah buruh tani, serta turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meskipun secara nasional tingkat kemiskinan

menurun, namun tidak diikuti dengan tingkat kesenjangan yang masih relatif tinggi. Hal ini juga diikuti dengan tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan yang sama-sama meningkat. Kondisi tersebut semakin menunjukkan tingkat kesenjangan masyarakat yang lebih parah.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk terus menerus menekan angka kemiskinan ini. Salah satu caranya dengan mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas mungkin dan adanya efisiensi anggaran pemerintah yang harus lebih banyak dialokasikan untuk membangun infrastruktur sehingga mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi apabila iklim usaha lebih kondusif, investasi yang terus meningkat, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih tinggi, yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang determinan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kajian Pustaka

1.1 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2016). Jadi, kemiskinan terjadi karena terbatasnya daya beli seseorang karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang mereka butuhkan.

1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan persoalan berlarut-larut yang muncul dalam kegiatan ekonomi di suatu negara sebagai syarat menuju pada kondisi menjadi lebih baik ke depannya dengan terciptanya kapasitas pendapatan nasional yang meningkat yang dapat dilihat pada kapasitas produksi yang tinggi. Berhasilnya pembangunan ekonomi ialah kunci suksesnya dari pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ukuran analisis makro pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diketahui melalui pendapatan nasional riilnya (Ernita, Syamsul, & Efrizal, 2013).

1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mempunyai tujuan untuk membuat peningkatan laju investasi, kesempatan kerja meningkat, menjaga ekonomi tetap stabil, dan terciptanya pemerataan distribusi pendapatan yang merupakan bagian dari kebijaksanaan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Para ahli ekonomi mengemukakan teori makro tentang

pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tergolong dalam model pembangunan. Seperti Musgrave yang mengungkapkan bahwa GNP akan bertambah kecil apabila ada peranan pemerintah dalam proses dan persentase investasi. Selanjutnya pada tingkatan perkembangan ekonomi yang lebih jauh, Rostow menyatakan bahwa kegiatan pemerintah berpaling dari sebagai penyedia sarana dan prasarana ke pengeluaran pemerintah untuk kegiatan sosial, seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya (Amalia, Madris, & Abd., 2015).

1.4 Inflasi

Maksum & N.I. (2005) mengatakan, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus serta proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Inflasi merupakan proses suatu keadaan di mana, tingkat harga yang diibaratkan tinggi belum pasti menandakan inflasi. Inflasi dianggap terjadi apabila harga barang naik secara terus menerus, artinya naiknya harga barang ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua barang saja tetapi pada banyak barang yang sering dikonsumsi atau barang dasar pokok yang dibutuhkan masyarakat sehingga kenaikan harga tersebut mempengaruhi barang lainnya di pasaran. Definisi inflasi juga sering dipakai untuk menafsirkan jika uang yang beredar di masyarakat meningkat maka akan berdampak pada harga barang menjadi tambah mahal.

1.5 Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) secara luas diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja (*labor force*) tetapi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan. Istilah pengangguran juga dijelaskan sebagai kesenjangan peluang yang timbul antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja sehingga menyebabkan separuh angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Penyebab pengangguran tidak hanya karena kurangnya lapangan kerja yang terbatas tetapi juga karena kurangnya keahlian yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada dalam lowongan kerja (Nanga, 2001).

Metode Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai determinan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jenis pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu (*time series*). Variabel

yang diselidiki pada studi ini, ialah variabel tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, variabel pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan perubahan PDB atas dasar harga konstan, variabel pengeluaran pemerintah dilihat melalui belanja pemerintah per satu tahun anggaran, variabel inflasi dilihat atas indeks harga konsumen (IHK), dan variabel pengangguran dilihat lewat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif berdasarkan data sekunder, jurnal, artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan kointegrasi dan *Error Correction Model* (ECM).

Hasil dan Analisis

2.1 Uji Stasioneritas

Dalam data *time series*, tahapan awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengujian stasioneritas.

Tabel 2
Hasil Uji Stasioneritas
ADF Menggunakan *Trend and Intercept* pada Tingkat Level

Variabel	ADF t-statistic	McKinnon Critical Value 5%	Prob.	Ket.
LnKemiskinan	-5.860777	-3.658446	0.0007	Stasioner
LnPertumbuhan Ekonomi	-3.351016	-3.658446	0.0868	Tidak Stasioner
LnPengeluaran Pemerintah	1.147886	-3.733200	0.9997	Tidak Stasioner
LnInflasi	-6.420959	-3.658446	0.0002	Stasioner
LnPengangguran	-2.121525	-3.658446	0.5038	Tidak Stasioner

Sumber: Hasil Data Diolah

Berdasarkan hasil tabel 2 menampilkan variabel kemiskinan (Y) dan inflasi (X3) stasioner pada bentuk level. Dimana dapat dilihat dari hasil t-statistik ADF variabel kemiskinan (Y) dan inflasi (X3) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *McKinnon critical value* 5 persen. Sedangkan, untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan pengangguran (X4) tidak stasioner pada bentuk level

karena hasil t-statistik ADF lebih kecil dibandingkan nilai *McKinnon critical value* 5 persen.

Oleh karena itu, karena hanya hasil variabel kemiskinan (Y) dan inflasi (X3) yang stasioner pada tingkat level, maka dilakukan transformasi data ke dalam bentuk *first difference*. Hasil uji ADF tingkat *first difference* dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Uji Stationeritas
ADF Menggunakan *Trend and Intercept* pada Tingkat *First Difference*

Variabel	ADF t-statistic	McKinnon Critical Value 5%	Prob.	Ket.
DlnKemiskinan	-6.898158	-3.673616	0.0001	Stasioner
DlnPertumbuhan Ekonomi	-8.635241	-3.673616	0.0000	Stasioner
DlnPengeluaran Pemerintah	-6.838509	-3.673616	0.0001	Stasioner
DlnInflasi	-7.243413	-3.690814	0.0001	Stasioner
DlnPengangguran	-4.577758	-3.673616	0.0092	Stasioner

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 3 menunjukkan hasil uji stasioneritas semua variabel dalam penelitian ini sudah stasioner pada tingkat *first difference*. Karena sudah stasioner pada diferensi pertama maka tidak perlu melanjutkan uji stasioner ke diferensiasi kedua. Dari hasil t-statistik ADF seluruh variabel sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai *McKinnon critical value* 5 persen.

2.2 Hasil Estimasi

Berdasarkan uji stasioneritas, variabel kemiskinan (Y) dan inflasi (X3) sudah stasioner pada tingkat level. Sedangkan, variabel pertumbuhan ekonomi (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan pengangguran (X4) baru stasioner pada tingkat *first difference*. Artinya, teknik analisis dengan menggunakan pendekatan kointegrasi dan estimasi *Error Correction Model* (ECM) tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat.

Sehingga model ekonometrik menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\Delta \text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \Delta \text{Ln}X_1 + \beta_2 \Delta \text{Ln}X_2 + \beta_3 \Delta \text{Ln}X_3 + \beta_4 \Delta \text{Ln}X_4 + e$$

Di mana:

- $\Delta \text{Ln}Y$: Tingkat Kemiskinan (%)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi
- $\Delta \text{Ln}X_1$: Pertumbuhan Ekonomi (%)
- $\Delta \text{Ln}X_2$: Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)
- $\Delta \text{Ln}X_3$: Inflasi (%)
- $\Delta \text{Ln}X_4$: Pengangguran (%)
- e : Error term.

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\Delta \text{LnKemiskinan} = -0.042152 - 0.152479 \Delta \text{LnPE} + 0.101913 \Delta \text{LnPP} - 0.008662 \Delta \text{LnINF} + 0.042003 \Delta \text{LnPN}$$

Tabel 4
Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.042152	0.020644	-2.041844	0.0592
D(LNPERTUMBUHAN_ EKONOMI)	-0.152479	0.031400	-4.855980	0.0002
D(LNPENGELUARAN_ PEMERINTAH)	0.101913	0.115177	0.884838	0.3902
D(LNINFLASI)	-0.008662	0.012897	-0.671663	0.5120
D(LNPENGANGGURAN)	0.042003	0.140290	0.299398	0.7687

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi variabel perubahan pertumbuhan ekonomi ($\Delta \text{Ln}X_1$) berdampak negatif dan secara statistik signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan ($\Delta \text{Ln}Y$). Nilai koefisien variabel perubahan pertumbuhan ekonomi ($\Delta \text{Ln}X_1$) adalah sebesar -0.152479. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan di Indonesia turun sebesar 0.152479 persen. Ini sama dengan penelitian Ramdani (2015), menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan masyarakat

mampu membuat jumlah penduduk miskin berkurang, ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Variabel perubahan pengeluaran pemerintah (ΔLnX2) berdampak positif terhadap perubahan tingkat kemiskinan (ΔLnY) namun secara statistik tidak signifikan. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah (ΔLnX2) menunjukkan angka sebesar 0.101913. Artinya, setiap kenaikan 1 persen pada pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0.101913 persen. Hasil ini diperkuat dengan studi empiris dari Ramdani (2015), menunjukkan bahwa tidak signifikannya pengeluaran pemerintah karena belum berhasilnya kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk menurunkan taraf kemiskinan serta yang pasti dibutuhkan waktu yang lama supaya pelaksanaannya efektif. Dari berbagai tindakan yang bisa dijalankan satu di antaranya yakni dengan menambahkan jatahnya lebih banyak. Bertambahnya jatah pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan diharapkan memberikan dampak yang singkat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, masalah lain tidak signifikannya pengeluaran pemerintah ini dikarenakan gagalnya program pengentasan kemiskinan yang disebabkan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap program-program yang sedang dijalankan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

Variabel perubahan inflasi (ΔLnX3) berdampak negatif terhadap perubahan tingkat kemiskinan (ΔLnY) namun secara statistik tidak signifikan. Koefisien regresi inflasi (ΔLnX3) menunjukkan angka sebesar -0.008662. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Variabel perubahan pengangguran (ΔLnX4) terhadap tingkat kemiskinan (ΔLnY) adalah positif namun secara statistik tidak signifikan. Koefisien regresi variabel pengangguran (ΔLnX4) menunjukkan angka sebesar 0.042003. Artinya, jika pengangguran bertambah 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0.042003 persen di Indonesia. Hasil ini memberikan implikasi bahwa setiap terjadi kenaikan angka pengangguran maka dapat menambah angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun penelitian ini memperlihatkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi angkatan kerja ini masih berstatus sebagai pelajar maupun mahasiswa sehingga biaya hidup mereka masih ditanggung oleh orang tua mereka karena mereka masih belum mampu membiayai kebutuhan hidup mereka sendiri. Hasil ini seiringan dengan penelitian dari Endrayani &

Made (2016), yang mengindikasikan pengangguran terjadi di Bali bukan bagian dari masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tetapi karena orang-orang ini masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang ataupun keahlian yang mereka kuasai sehingga mereka masih menunggu lapangan pekerjaan yang menurut mereka sesuai dengan keinginan mereka.

Penutup

3.1 Kesimpulan

Pertama, berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis determinan tingkat kemiskinan di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil uji stationeritas menunjukkan derajat integrasi yang berbeda antar variabel dalam penelitian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian kointegrasi. Penggunaan *Error Correction Model* (ECM) dalam penelitian ini tidak dimungkinkan karena model ECM mensyaratkan terdapatnya hubungan kointegrasi antar variabel. Hasil ini memberikan indikasi kemungkinan tidak terdapatnya hubungan jangka panjang antara variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi dan tingkat pengangguran dengan variabel tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kedua, hasil estimasi dengan menggunakan model regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ketiga, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini menjelaskan bahwa setiap penambahan pada pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan sudah tepat sasaran namun tidak menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Keempat, variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kelima, variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik. Jadi, apabila pengangguran mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat. Dengan demikian, kenaikan pengangguran akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dari hasil estimasi variabel pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia memberikan implikasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan determinan utama dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

3.2 Keterbatasan Penelitian

Pertama, keterbatasan di penelitian ini disebabkan data yang dipakai ialah data tahunan dengan jumlah observasi hanya sebanyak 20 *series*. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam ketersediaan data untuk beberapa variabel.

Kedua, determinan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di studi ini cuma mengambil empat variabel, yakni variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran. Sehingga kemungkinan perlu untuk menambahkan variabel penting lainnya yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Daftar Referensi

- Amalia, R., Madris, & Abd., R. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Government Spending, Poverty*, 4(2), 183-189.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Endrayani, N. K., & Made, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 63-88.
- Ernita, D., Syamsul, A., & Efrizal, S. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2), 176-193.
- Leasiwal, T. C. (2013). Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 7(2), 196-303.
- Maksum, H., & N.I., Earlyanti. (2005). *Ekonomi SMA/MA Kelas XI Jilid I*. Jakarta: Piranti Darma Kolakatama.
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramdani, M. (2015). Determinan Kemiskinan Di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58-64.

Samuelson, P. A., & William, D. (2005). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.